**KORUPSI MANTAN DIRUT PDAM MOJOKERTO DITINJAU DARI TEORI
“TATANAN MORAL SUBJEKTIF DAN TATANAN MORAL OBJEKTIF “
FILSAFAT MORAL**

DOSEN MATA KULIAH

DR AGUSTINUS W. DEWANTARA,SS.,M.HUM

DISUSUN OLEH

ENDAH PUJI WAHYUNINGTIYAS (3803019007)

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA
KAMPUS MADIUN**

TAHUN 2019

ABSTRAK

Korupsi menurut Dr.Kartini Kartono adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mendapat keuntungan sebanyak - banyaknya dan merugikan kepentingan umum.Jadi korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan terhadap sumber kekayaan negara demi kepentingan pribadi dan untuk memperkaya diri sendiri.Kasus korupsi ini memiliki tatanan moral subjektif, obyektif, dan hati nurani yang buruk.Tidak semua tindakan mencuri itu salah.Jika mencuri dalam keadaan terpaksa, seperti mencuri untuk makan itu belum tentu nilai moralnya buruk.Tetapi berbeda lagi dengan korupsi.Korupsi berarti mencuri harta negara yang digunakan untuk keperluan pribadi atau untuk berfoya-foya.Korupsi tersebut termasuk dalam nilai moral yang buruk karena merugikan diri sendiri dan juga merugikan banyak orang.

Keywords = Korupsi, Tatanan moral subjektif, Tatanan moral objektif

KORUPSI MANTAN DIRUT PDAM MOJOKERTO

Penulisan Paper ini Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Filsafat Moral

1. DASAR TEORI

Korupsi menurut Dr.Kartini Kartono adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan dan merugikan kepentingan umum.Jadi korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan terhadap sumber kekayaan negara demi kepentingan pribadi dan untuk memperkaya diri sendiri.

Korupsi menurut wikipedia adalah dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) atau tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Korupsi di Indonesia saat ini sudah sangat parah.Adanya kenaikan tingkat korupsi baik dari segi jumlah uang atau pelaku yang melakukan praktek korupsi.Korupsi merupakan tindakan pidana yang luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas.Korupsi ada karena rendahnya kualitas sumber daya manusia dari segi kualitas moral dan kepribadiannya.Rendahnya moral dan tingkat kejujuran dari aparat peyelenggara negara yang menyebabkan terjadinya korupsi.

Korupsi sangat sulit untuk diberantas, karena korupsi ada karena butuh.Orang membutuhkan uang dan bagi mereka yang tidak memiliki perilaku jujur maka akan tamak atau rakus.Dan juga karena hukuman yang diberikan kurang tegas dan terlalu ringan.Sehingga kurang memberikan efek jera pada pelaku, dan orang lain yang belum melakukan korupsi tidak takut akan hukuman tersebut dan berani melakukan korupsi.

Tatanan moral ada 2 yaitu Tatanan Moral Subjektif dan Tatanan Moral Objektif.Tatanan moral subjektif adalah pedoman baik atau buruk yang ada atau tertanam dalam diri setiap manusia tanpa kecuali.Sanksi yang berlaku adalah sanksi moral, misalnya rasa bersalah, berdosa, dll.Jadi dalam tatanan moral subjektif hati nuranilah yang

mengadili dan mengawasinya, dan hati nurani itu berurusan dengan dirinya sendiri dan tuhan.(Dewantara,2017:18)

Namun, jika Tatanan Moral Obejktif adalah pedoman baik atau buruk yang ada dalam hidup bersama, dibuat bersama, dan disepakati bersama demi kebaikan manusia, ia bisa berupa hukum, undang-undang, norma, dll.Instansi yang mengawasi dan mengadilinya adalah negara, polisi, masyarakat, KPK, pengadilan,dll.Sanksi yang berlaku adalah dikenai sanksi, hukuman, penjara, dll.(Dewantara,2017:30)

Jika ditinjau dari hati nurani, Tindakan korupsi merupakan hati nurani yang sesat dan tumpul.Hati nurani yang sesat adalah seseorang melakukan tindakan yang salah, dia sadar telah melakukannya dan terus mengulangnya.Orang yang melakukan tindakan yang jahat atas dorongan hatinya yang sesat maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.Hati nurani seperti ini harus diperbaiki dan tidak bisa terus menerus melakukan perbuatan jahat seperti itu, ia harus menyembuhkan hati nuraninya yang sesat tersebut.

Kesesatan biasanya karena kelalaian dari seseorang melakukan suatu tindakan.Apabila kesesatan terus dibiasakan padahal mereka mengetahui apa yang dilakukannya itu salah mereka termasuk memiliki moral yang buruk.Dan kemungkinan apapun yang dilakukan oleh orang tersebut adalah perbuatan yang jahat, karena ia memiliki hati yang sesat.

Tetapi jika hati nurani yang tumpul adalah hati nurani ini kurang peka terhadap nilai-nilai kebenaran dan sudah menjadi kebiasaan.Biasanya penyebab hati nurani ini dikarenakan oleh material atau konsumerisme.Ia lebih mementingkan hal-hal seperti kepentingan dirinya sendiri.Hati nurani ini kita harus memperbaikinya dengan meruncingkan hati nurani agar menjadi hati nurani yang tajam yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.Hati nurani sesat dan tumpul ini harus diperbaiki agar keduanya berubah menjadi hati nurani yang tajam.Dan tidak membiarkan diri dalam ketumpulan hatinya dan terus melakukan kesalahan yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain.

2. PEMBAHASAN

a. Berita

Kasus ini bermula saat Trisno Nur Palupi menjabat Dirut PDAM Maja Tirta Mojokerto melakukan pembelian tawas menggunakan melalui perusahaan milik Maju Sitorus. Pembelian Tawas tanpa persetujuan walikota Mojokerto maupun dewan pengawas. Mereka telah melakukan mark up atas harga tawas yang lebih mahal dari harga pasar yang mengakibatkan negara rugi 1 milyar. Selain itu sebagai direktur Trisno Nur Palupi juga menyalahgunakan kewenangannya karena telah menggunakan dana kas, mulai tahun 2013 hingga 2017.

Majelis hakim I Wayan Sosiawan SH menegaskan Mantan Dirut PDAM Maja Tirta Mojokerto, Trisno Nur Palupi dihukum 6 tahun penjara karena dianggap terbukti bersalah atas kasus pembelian bahan kimia jenis tawas. Selain divonis 6 tahun terdakwa juga diwajibkan membayar denda 200 juta rupiah, subsider 3 bulan kurungan karena Trisno terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) "Menjatuhkan pidana pokok dengan hukuman penjara selama 6 tahun dikurangi masa hukuman," kata I Wayan. Meski terbukti bersalah, terdakwa tidak dihukum membayar uang pengganti atas kerugian negara yang ditimbulkan kasus ini.

Hukuman juga dijatuhkan ke terdakwa Direktur Utama PT Chrismalis Artha Maju Sitorus sama dengan vonis yang dijatuhkan ke terdakwa Tresno Nur Palupi hanya saja memberikan tambahan hukuman berupa uang pengganti sebesar 913 juta dan apabila tidak dibayar selama 1 bulan setelah putusan maka akan diganti pidana selama 3 tahun.

b. Argumen

Kasus korupsi ini memiliki tatanan moral yang buruk. Tidak semua tindakan mencuri itu salah. Jika mencuri dalam keadaan terpaksa, seperti mencuri untuk makan itu belum tentu nilai moralnya buruk. Tetapi berbeda lagi dengan korupsi. Korupsi berarti mencuri harta negara yang digunakan untuk keperluan pribadi atau untuk berfoya-foya. Korupsi tersebut termasuk dalam nilai moral yang buruk.

Dalam kasus korupsi ini, tatanan moral subjektif dan tatanan moral objektif dua-duanya berpengaruh pada penilaian baik dan buruk dari suatu tindakan manusia. Menurut

tatanan moral objektif, pelaku korupsi bersalah karena melanggar Undang-undang No.31 Tahun 1999 pasal 2 yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar.

Tetapi sekarang banyak pelaku yang bisa menyuap hakim atau jaksa akhirnya ia bisa lolos dalam hukuman, banyak kejadian korupsi di Indonesia yang hanya mendapat hukuman yang ringan. Tapi dalam kasus korupsi oleh Mantan Dirut PDAM Mojokerto ini dikenai vonis 6 tahun penjara dan mendapat denda.

Jika dilihat dari tatanan moral subjektif, Hati nurani pelakulah yang mengadili dirinya sendiri. Hati nurani ini berurusan dengan dirinya sendiri dan Tuhannya. Bisa jadi pelaku merasa bersalah, berdosa atau tidak merasa sama sekali. Orang yang melakukan tindakan korupsi berarti ia memiliki hati nurani yang sesat, karena dia tahu bahwa korupsi itu perbuatan yang buruk tetapi dia tetap melakukan perbuatan tersebut dengan sadar dan menikmati hasil perbuatan tersebut untuk dirinya sendiri.

Seorang koruptor tidak akan bisa meloloskan diri dari hukum, karena pada dasarnya hukum itu mengantarkan menuju kepada kebaikan, kepada tatanan hidup lebih baik agar bisa bertaubat dan merubah diri menjadi lebih baik. Tidak akan bisa lolos dari rasa bersalah dan berdosa karena menzalimi orang yang sudah mempercayainya dan memberikan amanah tetapi malah menyimpang dari aturan.

Orang yang melakukan korupsi memiliki kejahatan moral yang sangat jahat. Karena dia tidak menggunakan hati nurani dengan benar. Seharusnya dia menggunakan akal budi secara sehat dan jernih sebelum melakukan tindakan korupsi tetapi ini tidak. Seharusnya kepentingan umum lebih penting atau lebih utama daripada kepentingan pribadi ini malah sebaliknya kepentingan pribadi lebih didahulukan daripada kepentingan umum.

Faktor terjadinya korupsi itu sendiri biasanya dikarenakan sikap mental para pegawai atau pemerintahan yang ingin memperkaya diri dengan cara yang haram. Tidak ada kesadaran bernegara dan tidak mementingkan kepentingan rakyat melainkan kepentingan pribadi yang lebih penting. Korupsi itu sendiri menyebabkan pembangunan

ekonomi di Indonesia semakin sulit. Korupsi juga mengurangi pemenuhan pembangunan, pelayanan pemerintah dan infrastruktur serta akan menambah beban terhadap anggaran pemerintahan.

Oleh karena itu, korupsi itu harus diberantas. Jika belum bisa diberantas setidaknya korupsi itu dikurangi yang harus dikurangi adalah para aparatur negara yang dipilih oleh rakyat dan seharusnya untuk rakyat. Karena jika korupsi tidak diberantas korupsi itu akan menghancurkan negara itu sendiri. Perlu adanya moral yang baik dan kejujuran dari para manusia itu sendiri agar tidak tergoda dengan hawa nafsu yang malah merugikan diri sendiri atau bahkan orang lain.

Kepala Dirut PDAM Mojokerto ini memiliki hati nurani yang kurang peka terhadap nilai-nilai kebenaran. Memiliki hati nurani sesat dan tumpul. Mereka lebih terdorong untuk melakukan tindakan yang jahat dan merugikan orang lain. Hati nurani ini harus diasah dan diperbaiki agar tidak merugikan orang lain bahkan negara. Orang yang memiliki hati nurani yang sesat dan tumpul apabila dia melakukan sesuatu dia akan melakukan hal dengan perkara yang besar. Kalau tidak diperbaiki ia akan terus-terusan berbuat jelek seperti itu.

Kita tahu bahwa korupsi itu tidak sesuai dengan tatanan moral obyektif dan tatanan moral subjektif karena itu hal yang dilarang. Dimana seharusnya pemerintah lebih mementingkan kepentingan umum atau kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Tetapi ini malah mementingkan kepentingan pribadi. Itu sudah menyimpang dari prinsip manusia sebagai makhluk sosial dan mengutamakan kepentingan bersama.

Kita sebagai mahasiswa juga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Kita sebagai penerus bangsa juga harus memiliki moral yang baik dan rasa peduli serta rasa bertanggung jawab dalam memajukan negara serta memberantas korupsi. Pasti para anggota pemerintah akan digantikan oleh penerus bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa harus menanamkan kesadaran dalam diri kita sebagai mahasiswa untuk turut memajukan Indonesia dengan tidak melakukan korupsi.

Dalam pemberantasan korupsi, kita sebagai mahasiswa memiliki kompetensi dasar yaitu pengetahuan intelektual, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan pendapat atau kebenaran. Dalam lingkungan kampus ataupun masyarakat mahasiswa harus ikut berpartisipasi dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di

lingkungan kampus mahasiswa mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi universitas. Tidak bersikap acuh tak acuh didalam setiap kejadian yang ada. Dan membuka wawasan dan pemahaman seluas-luasnya tentang penyelenggaraan pemerintah dan aspek-aspek hukumnya.

Penanganan korupsi harus dilakukan dengan cara yang menyeluruh atau meliputi semua aspek dan perlu dilakukan pencegahan sejak dini. Karena salah satu penyebab terjadinya korupsi adalah sumber daya manusianya itu sendiri. Seperti sudah mendalamnya mental dan cara berpikir untuk korupsi pada masyarakat Indonesia. Pencegahan sejak dini bisa dilakukan lewat jalur pendidikan dengan memberitahu tentang korupsi.

Perlu adanya partisipasi dari semua kalangan baik instansi pemerintahan, masyarakat, mahasiswa, anggota dewan dalam memberantas korupsi ini. Harus ada yang berani berpendapat tentang korupsi dan mengkritik yang sifatnya membangun. Agar para pejabat tidak melakukan tindakan korupsi dan kinerjanya bisa lebih baik lagi. Dan agar para instansi pemberantas korupsi bisa lebih baik kinerjanya dalam memberantas korupsi. Gerakan masyarakat anti korupsi harus diterapkan dan diedukasikan sejak dini. Untuk para generasi penerus bangsa harus menanamkan jiwa anti korupsi sejak dini agar karakter yang dibangun sejak dini bisa memiliki prinsip anti korupsi sampai nanti dewasa.

Gerakan anti korupsi bagi pemuda sudah sangat sulit dilakukan. Tetapi paling tidak para pemuda harus melawan orang tuanya, saudaranya, teman, dan orang terdekat lainnya yang melakukan korupsi. Selain itu, juga harus melawan dirinya sendiri agar tidak melakukan korupsi. Untuk menjalankan gerakan anti korupsi ini perlu berbagai dukungan berbagai elemen seperti melakukan kampanye dan pendidikan anti korupsi, melakukan penelitian untuk mendukung gerakan anti korupsi, mendorong kebijakan pemerintah mengenai pemberantasan korupsi.

Kejujuran adalah hal yang paling penting. Jika kita tidak berperilaku jujur maka akan ada saja godaan untuk melakukan tindakan korupsi. Korupsi adalah tindakan yang memperkaya diri sendiri yang menyebabkan kerugian pada perekonomian negara. Korupsi sudah menjadi penyakit di Indonesia sejak lama dan tak kunjung selesai, karena pengobatan dari penyakit tersebut tidak tepat sasaran seperti tidak adanya hukuman yang keras.

Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Pencegahan korupsi harus dilakukan daripada mengobati korupsi itu sendiri. Karena lebih mudah mencegah daripada memberantas korupsi itu sendiri. Karena sudah banyak para pejabat atau pemerintahan yang melakukan korupsi karena kurangnya pengetahuan tentang apa itu korupsi dan dampak korupsi. Dengan slogan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Tetapi nyatannya dari rakyat oleh rakyat dan untuk diri sendiri. Karena yang dia korupsi merupakan uang rakyat yang seharusnya dirasakan rakyat. Yang seharusnya adanya pembangunan dan perbaikan-perbaikan jadi terhambat karena adanya atasan yang melakukan korupsi. Korupsi menghambat ekonomi rakyat dan harus diberantas semaksimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dewantara,W.2017.Diskursus Filsafat Moral Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia.Yoygakarta:PTKanisius.
- 2.*beritajatim.com*
3. Dewantara, A. W. (2015). Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Agama Di Indonesia. *CIVIS*, 5(1/Januari).
4. DEWANTARA, A. W. (2016). *GOTONG-ROYONG MENURUT SOEKARNO DALAM PERSPEKTIF AKSIOLOGI MAX SCHELER, DAN SUMBANGANNYA BAGI NASIONALISME INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
5. Dewantara, A. W. (2017). Kerasulan Awam Di Bidang Politik (Sosial-Kemasyarakatan), Dan Relevansinya Bagi Multikulturalisme Indonesia. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 18(9), 3-15.
6. Dewantara, A. W. (2017). MULTIKULTURALISME INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA KONSEP MADANI NURCHOLISH MADJID DAN KONSEP CIVIL SOCIETY). *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17(9), 15-25.
7. Dewantara, A. W. (2015). Filosofi Pendidikan yang Integral dan Humanis dalam Perspektif Mangunwijaya. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 13(7), 3-9.
8. Dewantara, A. W. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan. *Madiun: STKIP Widya Yuwana*.
9. Dewantara, A. W. (2016). POLITIK MENURUT FOUCAULT DALAM “THE ARCHAEOLOGY OF KNOWLEDGE” DAN RELEVANSINYA BAGI MULTIKULTURALISME INDONESIA. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 15(8), 12-22.
10. Dewantara, A. W. (2016). MEREFELESIKAN TUHAN DALAM PERSPEKTIF METAFISIKA, DAN RELEVANSINYA BAGI MULTIKULTURALISME INDONESIA. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 16(8), 3-18.
11. Dewantara, A. W. (2019). RADIKALISME AGAMA DALAM KONTEKS INDONESIA YANG AGAMIS DAN BERPANCASILA. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 19(1), 1-14.